



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, SISTEM  
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, KOMPETENSI  
SUMBER DAYA MANUSIA DAN TEKNOLOGI INFORMASI  
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK**

SKRIPSI

Rahma Sarita

1802015090

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JAKARTA  
2023



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, SISTEM  
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, KOMPETENSI  
SUMBER DAYA MANUSIA DAN TEKNOLOGI INFORMASI  
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK**

SKRIPSI

Rahma Sarita

1802015090

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JAKARTA  
2023

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul **“PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK”** merupakan hasil kerja sendiri dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau diteliti oleh orang lain dan sebagian bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA atau perguruan tinggi lainnya. Semua sumber baik yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan baik dan benar. Apabila ternyata di kemudian hari penelitian (skripsi) ini merupakan hasil penjiplakan atau plagiat terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi maupun hukuman berdasarkan aturan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Jakarta, 17 Juni 2023

Yang menyatakan



(Rahma Sarita)

NIM 1802015090

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**JUDUL** : **PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK**

**NAMA** : **Rahma Sarita**

**NIM** : **1802015090**

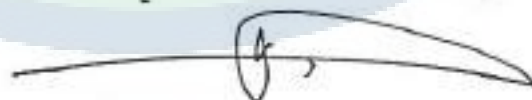
**PROGRAM STUDI** : **AKUNTANSI**

**TAHUN AKADEMIK** : **2022/2023**

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan dalam ujian skripsi

Pembimbing I	Dewi Pudji Rahayu, S.E., M.Si.	
Pembimbing II	Herwin Kurniawan, S.E., M.M	

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka



Meita Larasati, S.Pd., M.Sc

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi dengan Judul:

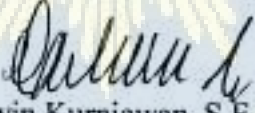
**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK**

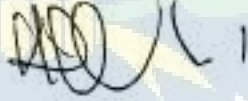
Yang disusun oleh:  
Rahma Sarita  
1802015090

Telah diperiksa dan dipertahankan di depan panitian ujian kesarjanaan strata satu (S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA  
Pada tanggal: 8 Juli 2023

Tim penguji,  
Ketua, Merangkap anggota:

  
(Ahmad Subaki, SE., Ak., MM.CA.CPA)  
Sekretaris, Merangkap anggota:

  
(Herwin Kurniawan, S.E., M.M)  
Anggota:


  
(Yanto, SE., Ak., M.Ak., CA)

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR. HAMKA

Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR. HAMKA

  
(Meita Larasati, S.Pd., M.Sc)

  
(Dr. Zulpahmi, S.E., Ak.Sr)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahma Sarita

NIM : 1802015090

Program Studi : SI Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Jenis Karya : Skripsi

Dengan pengembangan ilmu dan pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non Exclusive Royalti Free-right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menyantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 17 Juni 2023

Yang menyatakan,



(Rahma Sarita)  
NIM 18020150190

## ABSTRAK

Rahma Sarita (1802015090)

### **PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK**

*Skripsi Program Strata Satu Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2023. Jakarta*

Kata kunci : Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok.

Variabel yang diteliti yaitu Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Informasi sebagai variabel bebas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini yaitu kepala/staf Bagian Keuangan yang bekerja di OPD Kota Depok. Sampel yang digunakan sebagai responden yaitu sebanyak 138 orang. Data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner. Pengolahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda, yang diolah dari data primer dengan menggunakan SPSS 26.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai signifikansi  $t\ 0,094 > 0,05$ , Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki nilai signifikansi  $t\ 0,026 < 0,05$ , Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai signifikansi  $t\ 0,010 < 0,05$ , Teknologi Informasi memiliki nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki nilai signifikansi  $F$  sebesar  $0,000 < 0,05$ . Besarnya  $R\ Square$  adalah 59,1%, sisanya yaitu 40,9% dipengaruhi oleh variabel lain atau variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Oleh sebab itu, disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel bebas lainnya dan diharapkan dapat menambahkan sampel karena semakin banyak sampel yang digunakan maka akan semakin baik pula data dan hasil penelitiannya.

## ***ABSTRACT***

**Rahma Sarita (1802015090)**

### **THE INFLUENCE OF INTERNAL CONTROL SYSTEMS, REGIONAL FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEMS, HUMAN RESOURCES COMPETENCE, AND INFORMATION TECHNOLOGY ON THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTS IN DEPOK GOVERNMENTS**

*Skripsi Program Strata Satu Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2023. Jakarta*

**Keywords** : Internal Control Systems, Regional Financial Accounting Systems, Human Resources Competence, Information Technology, Quality of Local Government Financial Reports.

This study aims to determine the effect of the Internal Control System, the Regional Financial Accounting System, the Human Resources Competence, and the Information Technology on the Quality of Financial Reports in Depok Governments.

The variables studied were Internal Control Systems, Regional Financial Accounting Systems, Human Resources Competence, and Information Technology as independent variables. Quality of Local Government Financial Reports as the dependent variable. The population in this study is the head/staff of the Finance Section who work at the OPD in Depok City. The sample used as a respondent is as many as 138 people. The data used is primary data in the form of a questionnaire. Data processing in this research is using descriptive statistical analysis and multiple linear regression analysis, which is obtained from primary data using SPSS 26.

The results of this study indicate that the Internal Control System has a significance value of  $t \ 0.094 > 0.05$ , the Regional Financial Accounting System has a significance value of  $t \ 0.026 < 0.05$ , Human Resources Competence has a significance value of  $t \ 0.010 < 0.05$ , Information Technology has a significance value of  $t \ 0.000 < 0.05$ . Quality of Local Government Financial Reports has a significance value of  $F \ 0.000 < 0.05$ . R Square is 59.1%, the remaining 40.9% is influenced by other variables or variables not examined in this study.

Therefore, it is recommended for further research to add other independent variables and hopefully be able to add samples because the more samples used, the better the data and research results will be.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,*

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam juga saya hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun serta membawa seluruh umatnya menuju zaman yang terang benderang ini. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada keluarga, terutama kepada Bapak dan Mamah karena telah mempenjuangkan saya untuk melanjutkan pendidikan sampai akhir dan saya mampu untuk menyelesaikanskripsi ini.

Dalam Menyusun dan membuat skripsi ini, saya banyak mendapat bantuan serta dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnia Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Sumardi, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
4. Bapak M. Nurrasyidin, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Bapak Edi Setiawan, S.E., M.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
6. Bapak Dr. Tohirin, SHI., M.Pd.I., selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
7. Ibu Meita Larasati, S.Pd., M.Sc., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

8. Ibu Dewi Puji Rahayu, SE., M. Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi hingga saat ini terselesaikan.
9. Bapak Herwin Kumiawan, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi hingga saat ini terselesaikan.
10. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama saya kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
11. M. Alfarrel Ramadhan Gunawan yang selalu memberikan doa dan support agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Nur Hidayah, Aisyah Cherlynka Syavrinadi, Rani Antika, Laila Dwi Mauliana, Putri Aisyah, Dinda Ayu dan Hera Oktaviani dan teman-teman Angkatan 2018 yang telah membantu saya, menemani serta memberikan dukungan sehingga saya dapat semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Saya menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan pada saat menyusun dan membuat skripsi ini, oleh karena itu saya mengharap kritik serta saran yang membangun agar terciptanya skripsi yang baik dan sempurna. Saya berharap skripsi ini bisa dijadikan sebagai sarana dan referensi untuk menambah pengetahuan bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkaitan.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Jakarta, 17 Juni 2023

Peneliti



(Rahma Sarita)

NIM 1802015090

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan .....	12
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	12
1.2.2 Pembatasan Masalah .....	13
1.2.3 Perumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian .....	13
1.4 Manfaat Penelitian .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu .....	16
2.2 Telaah Pustaka .....	44
2.2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	44
2.2.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	61
2.2.3 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah .....	64
2.2.4 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah .....	70
2.2.5 Kompetensi Sumber Daya Manusia .....	73
2.2.6 Teknologi Informasi .....	75

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	77
2.4 Rumusan Hipotesis .....	78
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>79</b>
3.1 Metode Penelitian .....	79
3.2 Operasionalisasi Variabel .....	79
3.3 Populasi dan Sampel .....	84
3.3.1 <i>Populasi</i> .....	84
3.3.2 <i>Sampel</i> .....	85
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	87
3.4.1 <i>Tempat dan Waktu Penelitian</i> .....	87
3.4.2 <i>Teknik Pengumpulan Data</i> .....	87
3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	88
3.5.1 <i>Statistik Deskriptif</i> .....	88
3.5.2 <i>Uji Kualitas Data</i> .....	88
3.5.3 <i>Analisis Regresi Berganda</i> .....	90
3.5.4 <i>Uji Asumsi Klasik</i> .....	91
3.5.5 <i>Uji Hipotesis</i> .....	93
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>97</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	97
4.1.1 <i>Sejarah singkat Kota Depok</i> .....	97
4.1.2 <i>Deskripsi Data Responden</i> .....	98
4.2 Hasil Pengolahan Data dan Pembahasan .....	102
4.2.1 <i>Hasil Uji Statistik Deskriptif</i> .....	102
4.2.2 <i>Hasil Uji Kualitas Data</i> .....	103
4.2.3 <i>Analisis Regresi Linier Berganda</i> .....	110
4.2.4 <i>Hasil Uji Asumsi Klasik</i> .....	112
4.2.5 <i>Hasil Uji Hipotesis</i> .....	114
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian .....	118
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>125</b>
5.1 Kesimpulan .....	125
5.2 Saran.....	127

**DAFTAR PUSTAKA.....128**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	30
2.	Operasionalisasi Variabel Penelitian .....	82
3.	Sampel Penelitian.....	85
4.	Skala Pengukuran <i>Likert</i> .....	87
5.	Data Pengembalian Kuesioner .....	99
6.	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	99
7.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	100
8.	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	100
9.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan .....	101
10.	Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja .....	101
11.	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	102
12.	Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) .....	104
13.	Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal (X1) .....	105
14.	Hasil Uji Validitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) .....	106
15.	Hasil Uji Validitas Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) .....	107
16.	Hasil Uji Validitas Teknologi Informasi (X4) .....	108
17.	Hasil Uji Reliabilitas .....	109
18.	Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	110
19.	Hasil Uji Normalitas .....	112
20.	Hasil Uji Multikolinieritas .....	113
21.	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	114
22.	Hasil Uji t.....	115
23.	Hasil Uji F.....	117
24.	Hasil Uji Koefisiensi Determinasi .....	118
25.	Hasil Pengujian Hipotesis .....	119

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Template Laporan Realisasi Anggaran .....	49
2.	Template Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) .....	50
3.	Template Laporan Neraca .....	52
4.	Template Laporan Operasional .....	54
5.	Template Laporan Perubahan Ekuitas .....	55
6.	Template Laporan Arus Kas .....	59
7.	Template Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) .....	60
8.	Skema Kerangka Pemikiran Teoritis .....	77

## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Kuesioner Penelitian .....	1/43
2.	Tabulasi Data Kuesioner .....	5/43
3.	Hasil <i>Output</i> SPSS 26 .....	20/43
4.	Tabel Uji t .....	28/43
5.	Tabel Uji F .....	40/43
6.	Surat Tugas .....	41/43
7.	Catatan Konsultasi Dosen Pembimbing I .....	42/43
8.	Catatan Konsultasi Dosen Pembimbing II .....	43/43



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangga pemerintahannya sendiri yang berarti pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk menggunakan sumber-sumber keuangannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang di daerahnya masing-masing. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik pada masyarakat Indonesia saat ini adalah tuntutan agar pemerintah mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan pemerintah daerah tercapai. Transparansi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ialah prinsip keterbukaan dan kejujuran yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan sesuai peraturan dalam bentuk penyusunan laporan keuangan daerah. Sedangkan Akuntabilitas publik tersendiri dapat diartikan sebagai kewajiban pemerintah untuk mengelola sumber daya, memproses, melaporkan dan mengungkapkan seluruh aktivitas beserta kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada prinsipal (Mahmudi, 2010:23).

Maka dari itu pemerintah Indonesia dituntut masyarakat untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, karena laporan keuangan tersebut dapat mencerminkan ketertiban pengelolaan keuangan daerah baik dari segi tertib asas dan administrasi. Indikator untuk mengetahui apakah laporan

keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas atau masih belum cukup baik yakni dengan diterimanya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (Adhi dan Suhardjo, 2013).

Secara umum terdapat 4 jenis opini audit BPK, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, dan Menolak Memberikan Pendapat (Disclaimer). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat maupun daerah, sebab dengan opini tersebut institusi yang bersangkutan dapat mengeskpresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/ masyarakat). Pemerintah Kota Depok meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebanyak 11 kali berturut-turut sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2021. Menurut Wali Kota Depok, BPK telah memberikan penilaian yang objektif berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap LKPD, hal tersebut menjadi bukti adanya transparansi dan akuntabilitas atas LKPD Kota Depok (Tempo.co, 2022). Dengan memperoleh opini WTP, tingkat kepercayaan atas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat dan bermanfaat untuk membuat keputusan. Selain itu dengan diperolehnya opini WTP, maka diharapkan dapat membatasi penyalahgunaan anggaran Pemerintah Daerah yang kemudian dapat mengeliminir tindak korupsi.

Namun, tidak semua institusi mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pada tahun 2006 hanya 3 LKPD (0,65%) yang mendapat predikat Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) lalu pada tahun 2021 meningkat menjadi 486 LKPD (90%) yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020. (IHPS I BPK RI Tahun, 2021). Penyebab belum diperoleh opini WTP disebabkan antara lain, permasalahan ketidaksesuaian penyajian akun dengan SAP dan/atau ketidakcukupan bukti yang dijumpai dalam LKPD, permasalahan pertanggungjawaban, permasalahan ketidakpatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, lemahnya sistem pengendalian internal di pmda sehingga mengakibatkan banyaknya penyimpangan, sumber daya manusia (SDM) yang lemah khususnya yang mengelola keuangan daerah dan akuntansi.

Permasalahan terkait kualitas laporan keuangan yang berkenaan dengan perolehan WTP yaitu temuan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2022 yang dilakukan oleh bupati Bogor Ade Yasin, KPK menduga suap yang dilakukan oleh bupati Bogor sebesar Rp. 1,9 Miliar terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat tersebut dilakukan agar Pemerintah Kabupaten Bogor mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk anggaran tahun 2021 dari BPK. Dengan adanya permasalahan tersebut, dapat diartikan masih terdapat penyimpangan-penyimpangan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, lemahnya SDM dan sistem pengendalian internal yang dapat menghambat tujuan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu juga masih banyak penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Seperti kasus Penyalahgunaan APBD yang mencapai 100 Miliar yang

terjadi di Kabupaten Keerom, Sarmi dan Waropen. Modus yang dilakukan adalah tindak pidana korupsi tanpa melaksanakan kegiatan, penyalahgunaan anggaran untuk infrastruktur dan pemberian gratifikasi. (Kompas, 2020). Kasus lainnya yang dilakukan oleh Bupati Katingan yaitu kasus hilangnya APBD sebanyak 35M (Detik.com, 2019). Dengan kasus penyalahgunaan yang terjadi, serta kurangnya transparansi kepada masyarakat dapat diartikan pengelolaan dana tidak berjalan dengan baik.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan segala bentuk operasional ataupun kegiatan dalam pemerintah daerah. Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun akan diperiksa oleh BPK dan setelah itu dipertanggungjawabkan ke DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Tujuan dengan diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintah adalah memberikan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan menjadi persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan di Indonesia.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika laporan keuangan yang disajikan memenuhi syarat yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Karakteristik tersebut harus dipenuhi, oleh karena itu dalam hal pengelolaan keuangan tidak terlepas

dari peran sumber daya manusia yang ada di dalamnya dalam melakukan pelaporan keuangan serta pemanfaatan sumber daya manusia saja tidak cukup melainkan harus dibarengi pula dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi maka pekerjaan tersebut tentu akan lebih efektif dan efisien.

Penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang dilakukan oleh Muda, I., Haris Harahap, A., Erlina, E., Ginting, S., Maksum, A., & Abubakar, E. (2018). menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun secara parsial sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen dan pegawainya dalam menyediakan suatu kepastian terkait prestasi yang diperoleh secara obyektif dalam penerapan tentang laporan keuangan, efektif dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan, dan penerapan peraturan dan hukum yang berlaku agar ditaati oleh semua pihak (Mamuaja, 2016:167).

Sistem pengendalian intern terdiri dari 5 unsur yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi & komunikasi dan pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur tersebut merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Maka, yang menjadi fondasi dari pengendalian adalah SDM di

dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik. Sehingga apabila Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berjalan dengan baik maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah yang dilakukan oleh Ridzal, N. A., Sujana, I. W., & Malik, E. (2022) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Sumaryati, A., Praptika Novitasari, E., & Machmuddah, Z. (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, hal ini disebabkan karena pemerintah daerah belum sepenuhnya memanfaatkan sistem pengendalian internal dengan baik.

Sistem akuntansi keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tersebut, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah atau Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah.

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu sub sistem organisasi yang memfasilitasi kontrol dengan melaporkan kinerja pemerintah daerah. Ruang lingkup sistem akuntansi keuangan daerah mencakup kebijakan

sistem akuntansi, prosedur sistem akuntansi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi (Ratifah & Ridwan, 2012). Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi: Prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, akuntansi asset dan penyajian laporan keuangan. Salah satu tujuan sistem akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang andal, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan. Sehingga apabila sistem akuntansi keuangan daerah berjalan dengan efektif akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan sistem akuntansi pemerintah daerah atau sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah yang dilakukan oleh Brata, I. O. D., Arnan, S. G., & Suharsono, L. (2019) menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah atau sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Yanti, N. S., & Made, A. (2020) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah dikarenakan walaupun pemanfaatan sistem informasi akuntansi dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pencatatan dan pengelolaan data serta memiliki kontribusi yang kuat terhadap kualitas laporan keuangan daerah, namun hal itu saja tidak cukup karena

sistem informasi akuntansi juga membutuhkan kontrol oleh aparat, apabila tidak dikontrol dengan baik maka sistem komputerisasi akan mudah mengalami kendala yang akan menghambat proses pelaporan keuangan yang berkualitas.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Kompetensi sumber daya manusia, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Yendrawati, R., 2013). Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Kompetensi adalah tingkat keterampilan, pengetahuan, dan tingkah laku yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugasnya dalam organisasi (Wibowo, 2013). Faktor untuk menilai kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Sehingga apabila kompetensi SDM naik maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan naik.



Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah yang dilakukan oleh Rahayu, A. S., Ningsih, S., & Pratiwi, D. N. (2022) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Novyarni, N., & Aprileny, I. (2019) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah hal ini disebabkan karena sumber daya manusia yang mengelola laporan keuangan pemerintah tidak memiliki kredibilitas atau tidak memiliki latar belakang akuntansi.

Variabel selanjutnya adalah teknologi informasi, secara garis besar teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian: perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware). Perangkat keras menyangkut pada peralatan-peralatan yang bersifat fisik, seperti memori, printer, dan keyboard. Adapun perangkat lunak terkait dengan instruksi-instruksi untuk mengatur perangkat keras agar bekerja sesuai dengan tujuan instruksi-instruksi tersebut (Kadir, 2018:14)

Menurut Warsita (2018: 135) teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (*hardware, software, useware*) sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. Teknologi informasi dalam Pemerintah Daerah diintegrasikan dengan penerapan sistem informasi akuntansi yang merupakan tahap implementasi sistem atau aplikasi berbasis keuangan yang mendukung proses pemenuhan informasi keuangan yang sesuai guna pengambilan

keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Sistem informasi akuntansi pemerintah dibuat dengan tujuan mendukung aktivitas rutin suatu instansi pemerintahan serta pemenuhan informasi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Negara. Sehingga apabila Teknologi informasi bisa diterapkan semakin baik maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan naik.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah yang dilakukan oleh Roreng, P. P., Bandhaso, M., & Tandirerung, C. J. (2021) menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Tampubolon, F. M., & Hasibuan, A. B. (2019) menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini dikarenakan walaupun teknologi informasi semakin canggih tetapi bila tidak dibarengi dengan pemahaman, penguasaan, pelatihan serta proses kerja yang baik maka teknologi tidak dapat dimanfaatkan dengan tepat.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sundari, H., & Rahayu, S. (2019) yang menyatakan bahwa secara parsial menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan, pemanfaatan teknologi informasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Dikarenakan terdapat tingkat signifikansi yang berbeda dari variabel tersebut yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, dari penelitian yang telah dilakukan terdapat penambahan satu faktor yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan yang menjadi objek penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Depok. Sedangkan objek penelitian sebelumnya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Depok terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Depok, Inspektorat Daerah Kota Depok, 20 Dinas Daerah Kota Depok, 4 Badan Daerah Kota Depok, 11 Kecamatan dan 63 Kelurahan. Sedangkan variabel independent yang digunakan yaitu Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi.

Kota Depok merupakan sebuah Kota yang terletak di provinsi Jawa Barat yang umumnya merupakan bagian dari Kawasan metropolitan Jabodetabek. Kota Depok bermula dari sebuah Kecamatan yang berada di lingkungan Lawedanan (Pembantu Bupati) wilayah Parung Kabupaten Bogor. Pada tahun 1976 perumahan mulai dibangun baik oleh perumnas maupun pengembang yang kemudian diikuti dengan dibangunnya kampus Universitas Indonesia (UI), serta meningkatnya perdagangan dan jasa yang semakin pesat sehingga diperlukan kecepatan pelayanan. Maka dari itu dibentuklah Kota Administratif Depok yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud sekaligus melantik Wali

Kota Administratif pertama yaitu, Mochammad Rukasah Suradimadja oleh Gubernur Jawa Barat, Aang Kunaefi. Luas wilayah Kota Depok adalah 200,29 km<sup>2</sup> dan berdasarkan data pada tahun 2021 jumlah penduduk Kota Depok sebanyak 1.886.890 jiwa Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kota Depok sebanyak 2.484.186 jiwa (depokkota.bps.go.id).

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pengelolaan keuangan daerah di Kota Depok. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok”**

## **1.2 Permasalahan**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, peneliti mengambil dan memutuskan permasalahan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah ?
2. Bagaimana Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah ?
3. Bagaimana Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah ?
4. Bagaimana Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah ?

5. Bagaimana Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah ?

### ***1.2.2 Pembatasan Masalah***

Dalam melakukan penelitian ini peneliti membatasi masalah untuk terjadinya pembahasan yang tidak meluas, lebih terarah dan fokus. Beberapa keterbatasan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Periode pengelolaan keuangan yang diteliti terbatas yaitu hanya untuk tahun 2020
2. Penelitian yang dilakukan hanya pada OPD Kota Depok dan tidak membandingkan dengan Kota lainnya serta tidak membahas pengelolaan keuangan perencanaan jangka panjang.

### ***1.2.3 Perumusan Masalah***

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD Kota Depok Periode Tahun 2020”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, tentunya peneliti memiliki tujuan. Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
3. Untuk mengetahui Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
4. Untuk mengetahui pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
5. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur Akuntansi Sektor Publik (ASP) dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian lanjutan.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya sebagai sumbang saran kepada Pemerintah Kota Depok lebih khusus lagi Pemerintah Kecamatan dalam pengelolaan program dana yang akuntabel, transparan dan partisipatif.

3. Bagi Praktisi

Bagi para pembaca dan penulis selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat guna menambah informasi, wawasan serta pengetahuan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningtyas, V. E., Tyasari, I., & Yogivaria, D. W. (2020). Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pada OPD Kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1).
- Alminanda, P., & Marfuah, M. (2018). Peran komitmen organisasi dalam memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 16(2), 117-132.
- Ayu, P. C., & Kusumawati, N. P. A. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar. *Widya Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 113-126.
- Brata, I. O. D., Arnan, S. G., & Suharsono, L. (2019). The Effect of use of Regional Financial Accounting Systems (SAKD) and Government Internal Control System (SPIP) on the Quality of Regional Government Financial Statements (Survey on West Bandung District Government). *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(7).
- Darmawan, A., & Darwanis, D. (2018). Pengaruh sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi, kompetensi sumberdaya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan SKPA Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3(1), 9-19.
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64-75.
- Dewi, N., Azam, S., & Yusoff, S. (2019). Factors influencing the information quality of local government financial statement and financial accountability. *Management Science Letters*, 9(9), 1373-1384.
- Fitri Mariana, T. (2018). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Doctoral dissertation, Universitas Darma Persada).



Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

<https://metro.tempo.co/read/1594780/kota-depok-pertahankan-opini-wtp-11-kali-berturut-turut>

<https://www.bpk.go.id/ihps>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220713124120-12-8209/bupati-bogor-ade-yasin-didakwa-suap-bpk-jabar-rp19-miliar>

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/02/03/penyalahgunaan-apbd-capai-rp-100-miliar/>

<https://news.detik.com/berita/d-496359/bobol-apbd-rp-100-m-ini-aset-eks BUPATI-katingan-yang-dirampas-negara>

<https://depokkota.bps.go.id/indicator/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-.html>

<https://www.depok.go.id>

<https://www.ksap.org/sap/memahami-perhitungan-saldo-anggaran-lebih-sal/>

Jultri, A., & Made, A. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan New Public Management Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 9(1).

Krismiaji. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Erlangga.

Leiwakabessy, T. F. (2021). Komitmen Organisasi dan Motivasi sebagai Pemoderasi Hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 9(1), 29-40.

Lusiyana, D., Susbiyani, A., & Eko, D. (2020). Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting*, 2(1), 140-154.

Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi (Anggota IKAPI).

- Muda, I., Haris Harahap, A., Erlina, E., Ginting, S., Maksum, A., & Abubakar, E. (2018). Factors of quality of financial report of local government in indonesia.
- Mulia, R. A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal El-Riyasah*, 9(1), 7-21.
- Nugroho, E. (2018). *Prinsip-prinsip Menyusun Kuesioner*. Malang: UB Press.
- Novyarni, N., & Aprileny, I. (2019). Effect of Competence and Independence of Intern Auditor and Competence of Human Resource on the Quality of Financial Reporting at the Provincial Government and Municipal Government in Jakarta. In 5th Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2018), 27-31.
- Pemendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
- Pemendagri No. 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46a tahun 2003 tentang pedoman penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah
- Philadelphialia, I. S., Suryaningsum, S., & Sriyono, S. (2020). Pengaruh

- Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Islamic Accounting Research*, 2(1), 17-35.
- Putri, A. U., & Djuita, P. (2021). Analisis Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kelurahan Sukajaya Kota Palembang. *Jurnal Proaksi*, 8(1), 226-232.
- Rahayu, A. S., Ningsih, S., & Pratiwi, D. N. (2022). The Influence of Human Resource Competence, Implementation of Government Accounting Standards and Regional Financial Accounting System on The Quality of Regional Financial Reports (Empirical Study of SKPD Sukoharjo Regency). *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(3), 1841-1848.
- Ridzal, N. A., Sujana, I. W., & Malik, E. (2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3094-3104.
- Roreng P., Bandhaso, M., & Tandirerung, C. (2021). Competency Analysis of Human Resources and the Use of Information Technology on the Quality of Financial Reports in the Local Government of the City of Makassar. *WSEAS Transactions On Business and Economics*, 18, 1218-1222.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie, (2017), *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian*, Edisi 6, Buku 1, Cetakan Kedua, Salemba Empat, Jakarta Selatan 12610.
- Setyobudi, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan, Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(3), 502-509.
- Suhardjo, D.K. (2013). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Suhardjo, Y. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Semarang). *Solusi*, 17(4).

- Sumaryati, A., Praptika Novitasari, E., & Machmuddah, Z. (2020). Accounting Information System, Internal Control System, Human Resource Competency and Quality of Local Government Financial Statements in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business (JAFEB)*, 7(10), 795-802.
- Sundari, H., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun 2018). *eProceedings of Management*, 6(1).
- Triono, S., & Dewi, S. N. (2020). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 213-220.
- Wahyuni, S., Fadah, I., & Tobing, D. S. (2018). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan melalui pengelolaan barang milik daerah. *BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 12(1), 66-80.
- Yendrawati, R. (2013). Pengaruh sistem pengendalian intern dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan faktor eksternal sebagai variabel moderating. *Jurnal akuntansi dan auditing indonesia*, 17(2), 166-175.
- Yaqin, A., & Jatmiko, B. (2018). Kontribusi Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah: Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Biak Numfor. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 1-10.
- Yanti, N. S., & Made, A. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1).

